

KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

(Studi Kasus di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila
Kabupaten Bone Bolango)

Fenti Prihatini Tui
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo
fentiprihatini@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang dilihat dari: (1) aspek kemampuan intelektual (mental berpikir, menalar dan memecahkan masalah) belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan aparatur yang masih rendah; (2) aspek kemampuan fisik (stamina, keterampilan dan kekuatan) meskipun memiliki fisik yang kuat, namun keterampilan dalam mengelola administrasi masih belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Kata Kunci: Kemampuan Aparatur, Pengelolaan Administrasi, Pemerintahan Desa.

1. Pendahuluan

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Tugas pokok pemerintahan desa pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 1997:11). Lebih lanjut Rasyid (1997:48) mengemukakan bahwa salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintahan di samping fungsi memberdayakan dan pembangunan, adalah juga fungsi pelayanan.

Fenomena yang ada sekarang bahwa masih terdapat organisasi pemerintah yang belum dapat melaksanakan fungsi pelayanan dengan baik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik masih mewarnai penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Kemampuan kerja yang rendah yang

diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki aparat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan pada pemerintahan desa.

Imbaruddin (2007:23) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. *Pertama*, layanan publik yang disediakan oleh pemerintah semakin luas cakupannya dan semakin banyak jenisnya seiring dengan semakin berkembang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. *Kedua*, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat sering tidak sejalan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyediakan semua tuntutan masyarakat. *Ketiga*, kualitas pendidikan masyarakat yang relative semakin baik berakibat pada semakin meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Kualitas pelayanan yang kurang baik akan menyebabkan pemborosan waktu, uang, dan sumber daya yang lainnya juga meningkatkan resiko-resiko terjadinya kesulitan-kesulitan secara berantai. Demikian pula dalam pelayanan pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Pelayanan yang berkualitas dapat diwujudkan apabila aparat

penyelenggara pelayanan benar-benar professional, mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap tupoksinya.

Terkait dengan hal tersebut, maka organisasi pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan di tingkat desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat desa.

Hannon (2000: 238) menyatakan bahwa kemampuan merupakan kompetensi seseorang dalam memanfaatkan atau menggunakan keterampilan serta ilmu pengetahuan yang ada untuk dipergunakan di dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kemampuan merupakan kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan Robbin (2008:57). Terdapat dua faktor kemampuan yaitu: (1) Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berfikir, menalar dan memecahkan masalah; (2) Kemampuan fisik, yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina,

keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Robbin (2008:57).

2. Metodologi Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian yakni pengelolaan administrasi pemerintahan desa, maka lokasi penelitian ini adalah di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian (Bungin (2007). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk menggambarkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang sistematis yang menyelidiki fenomena di dalam kehidupan nyata (Yin: 2006).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: **(a) Sumber data primer**, yaitu hasil wawancara mendalam dengan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan *purposive sampling* (sampel bertujuan) dengan pertimbangan informan yang dipilih dipandang mengetahui

secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti (Umar, 2002: 131). Ada pun yang menjadi informan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu: (1) Informan internal, adalah pihak pemberi layanan atau aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango, (2) Informan eksternal adalah pihak masyarakat sebagai penerima layanan, **(b) Sumber Data Sekunder**, merupakan data pendukung yang terkait dengan fokus penelitian yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data menurut Yin (2006: 101): (a) Teknik wawancara, sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. (2) Observasi, dilakukan sebagai pengamatan lapangan peneliti terhadap obyek yang diteliti. (c) Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ada pun Teknik Pengabsahan data hasil penelitian melalui: (a) Derajat Kepercayaan (*Kredibilitas*) yang dilakukan melalui: (1) Ketekunan Pengamatan, (2) Triangulasi Sumber Data, (3) Pengecekan melalui diskusi,

dan (4) Kecukupan referensi. (b) Derajat Keteralihan (*transferabilitas*), merupakan teknik untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dengan menjelaskan hasil penelitian dengan penjelasan yang serinci-rincinya, gamblang, logis dan rasional tentang konteks dan fokus penelitian, sehingga mudah diterima oleh orang lain.

Sedangkan untuk Teknik Analisis Data secara runtut dilakukan melalui tahapan (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Miles, B, Huberman: 1992)

3. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa ditinjau dari aspek: (1) kemampuan intelektual (*intelektual ability*) dan (2) Kemampuan Fisik (*Physical Ability*)

(1) Kemampuan intelektual (*intelektual ability*) yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berpikir, menalar dan memecahkan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mental berpikir aparat kurang maksimal. Kurangnya inisiatif aparat dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan

kesan aparat pemerintahan desa kurang pekerjaan. Spencer dan Spencer (1993) menyatakan bahwa untuk meningkatkan hasil pekerjaan atau menghindari timbulnya masalah atau menciptakan peluang baru, seseorang harus memiliki inisiatif atau dorongan bertindak untuk melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dulu.

Sedangkan kemampuan menalar dan memecahkan masalah juga masih rendah. Jumlah aparat di kantor desa Bongopini adalah 10 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan 4 (empat) orang, dan Kepala Dusun 4 (empat) orang. Kesemuanya dengan tingkat pendidikan tertinggi SMA. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kecenderungan aparat pemerintahan desa yang bekerja hanya sesuai dengan instruksi dan hanya melaksanakan tugas rutin, namun untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan memecahkan masalah belum nampak, masih harus menunggu Kepala Desa atau Sekretaris Desa. Begitupula dengan kemampuan membuat konsep surat yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini memecahkan masalah masih rendah.

(2) Kemampuan Fisik (*Phisical Ability*, yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina,

keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa aparat pemerintahan desa Bongopini mempunyai stamina yang baik, hal ini dapat dilihat melalui kondisi fisik masing-masing dalam penyelesaian tugas baik dalam pengelolaan administrasi dalam lingkungan kantor maupun tugas lainnya di luar lingkungan kantor. Seperti yang dikemukakan oleh Robbins (2006) bahwa stamina merupakan kapasitas untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu cukup lama. Stamina yang baik dapat menunjang penyelesaian pekerjaan secara efisien.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil penelitian tentang aspek keterampilan aparat pemerintahan desa Bongopini sudah baik. Pengelolaan administrasi pemerintahan di desa Bongopini yang meliputi urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, Begitu pula dengan pencatatan urusan keuangan seperti administrasi pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan

administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya sudah menggunakan perangkat komputer. Ketersediaan 5 buah Laptop di kantor desa yang dioperasikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Kepala Urusan yang digunakan untuk pengelolaan administrasi desa sesuai tupoksi masing-masing. serta tersedianya sarana prasarana berupa jaringan internet, website informasi desa juga mengunjukkan bahwa aparat pemerintahan desa Bongopini kecamatan tilongkabila sudah memiliki keterampilan. Akan tetapi meskipun keterampilan yang dimiliki aparat tersebut masih perlu dikembangkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo (2007:103) bahwa Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterampilan menggunakan teknologi informasi di desa Bongopini hanya dimiliki oleh sebagian aparat, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan. Sedangkan aparat Kepala Dusun memiliki keterampilan yang masih rendah.. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya kemauan mereka dalam melatih keterampilannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh The Liang Gie

(2007:85) bahwa kegiatan menguasai keterampilan dengan tambahan bahwa mempelajari keterampilan harus dibarengi dengan kegiatan praktek, beralatih dan mengulang-ulang suatu kerja. Seseorang yang memahami semua asas, metode Dengan demikian maka aparat pemerintah desa Bongopini sudah memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi. Keterampilan memainkan peranan di kebanyakan kompetensi aparatur pemerintahan desa. pengetahuan dan teori dan mampu melaksanakan secara praktis adalah orang yang memiliki keterampilan.

4. Penutup

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa “kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila dilihat dari aspek kemampuan intelektual, belum optimal. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan aparatur yang masih rendah. Begitu pula dengan aspek kemampuan fisik, meskipun memiliki stamina yang kuat, dan dukungan sarana prasarana yang cukup memadai namun belum semua aparat memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk mengoptimalkan kemampuan pengelolaan administrasi pemerintahan Desa adalah: (1) untuk pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango, untuk dapat membuat kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Program Bantuan Pendidikan untuk Aparat Desa, serta pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa, (2) untuk mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dapat dilakukan oleh Kepala Desa dengan memberikan kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan, serta memberikan motivasi kepada aparat agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, B, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia
- Hannon, Pail D, Dean Patton, Sue Marlon. 2000. Transactional Learning Relationship: Developing Management Competencies for Effective Small Firm Stakeholder Interactions” *Education Training*. Vol. 42 No. 4/5.p.237-245
- Imbaruddin, Amir, 2007. “Ombudsman, Meningkatkan akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 13, No.3 p.23-31
- Rasyid, Ryaas. 1997. *Makna PEmerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Robbins, Stephen P, Timothy A. Judge. 2008 *Perilaku Organisasi* Buku 1 Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat
- Spencer, Lyle M. Jr, and Signe Spencer. 1993. *Competence at Work, Models for Superior Performance*. United States of Amerika: John Wiley & Sons. Inc

Gie, The Liang. 2007. *Administrasi Perkantoran modern*. Edisi Keempat Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Wibowo. 2007. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa